

48 PNS Ikuti Diklat Penatausahaan Aset



Wabup Ketika menyampaikan sambutan saat pembukaan Diklat di Gedung Korpri



Tampak peserta Diklat serius mendengarkan sambutan dari Wakil Bupati Kapuas Hulu

PUTUSSIBAU (MED) - 48 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, mengikuti Diklat penatausahaan aset bagi pengurus/penyimpan barang yang dilaksanakan di Gedung Korpri Putussibau, dimulai 10 s/d 14 Oktober 2011, sedangkan untuk Diklat ini dibuka Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana, SH, Senin (10/10) pukul 08.00 wib.

Tampak hadir dalam kegiatan Perwakilan Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat, Alpian, Sekretaris

Daerah Ir. H. M Sukri, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kapuas Hulu, Drs. H. Wan Mansyur Andi Mulya, M.T dan H. Sarbani, SE selaku Kepala badan Kepegawaian Daerah Kapuas Hulu yang juga merupakan Ketua Panitia Penyelenggaraan Diklat Penatausahaan Aset bagi Pengurus/penyimpan barang.

Dalam laporan Sarbani selaku ketua Panitia mengatakan, bahwa tujuan dilaksanakannya Diklat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tugas dan

fungsi pengurus/penyimpan barang, memberikan pemahaman tentang penatausahaan aset, dapat mengimplementasikan pengetahuan yang didapat akan penatausahaan aset/barang pada masing-masing unit kerja dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan dasar penyelenggaraannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 301 Tahun 2011 tanggal 5 Oktober 2011, tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penata-

usahaan aset bagi pengurus/penyimpan barang di lingkungan Kapuas Hulu tahun 2011serta Surat Kepala Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat Nomor 893.3/1463/DIKLAT-D Tanggal 12 September 2011 perihal izin penyelenggaraan Diklat penatausahaan aset bagi pengurus/penyimpan barang. Untuk materi kata Sarbani mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang Negeri/Daerah dan Permendagri Nomor 17 Tahun

2007 tentang petunjuk teknis pengelolaan barang milik daerah, dengan penyampaian materi sebanyak 50 jam pelajaran.

Sementara dalam sambutan Bupati yang disampaikan wakil Bupati Agus Mulyana, SH mengharapkan para peserta Diklat untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti Diklat, sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan aset daerah dengan baik sehingga predikat opini wajar tanpa pengecualian dapat diwujudkan, sebab Tahun 2010 Kapuas Hulu mendapatkan penilaian opini wajar dengan pengecualian dari BPK selain itu dapat juga peringkat kedua terbaik laporan keuangan se-Kalimantan Barat.

"Salah satu kriteria laporan keuangan Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK adalah tertib penatausahaan dan pengelolaan aset daerah, baik tertib administrasi, tertib inventarisasi maupun tertib laporan, untuk itu peningkatan kompetensi SDM dibidang penatausahaan dan administrasi aset menjadi sebuah keharusan guna menunjang keakuratan administrasi aset, hal ini tanggungjawab Kita bersama selaku aparaturnya. (timo)